

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem politik demokrasi. Demokrasi secara etimologis terbangun atas dua kata dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat serta “cratein atau cratos” yang bermakna kekuasaan sehingga demokrasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan negara dimana sistem pemerintahannya memberikan kedaulatan kepada rakyat. Adapun secara terminologi, demokrasi adalah suatu kondisi dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut pada akhirnya akan menentukan kehidupan rakyat itu sendiri.<sup>1</sup> Sistem politik demokrasi adalah sistem yang dimana kedaulatan tertingginya ada ditangan rakyat. Sistem politik demokrasi mulai dianut pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kedaulatannya pada tahun 1945.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dalam demokrasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam terbentuknya sebuah pemerintahan. Negara dalam sistem ini adalah milik rakyat seluruhnya. Hak-hak politik sistem ini mengharuskan partai politik lebih dari satu hingga rakyat mempunyai alternatif pilihan. Demokrasi juga menganut ideologi terbuka baik pemikiran masyarakat, tentang politik, ekonomi, sosial budaya dan

---

<sup>1</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 110-111

bahkan dapat disalurkan melalui karya-karya ilmiah, media pers ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi<sup>2</sup> merupakan bagian penting untuk menggerakkan sistem perpolitikan di Indonesia. Pemilu sendiri merupakan proses dimana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi mampu untuk memilih anggota lembaga DPR untuk pusat dan DPRD untuk tingkatan daerah, namun setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan kedalam rangkaian Pemilu, dan pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dijadikan bagian dari Pemilu. Namun istilah Pemilu sendiri lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Suatu pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Di Dalam demokrasi harus ada pemilu.<sup>3</sup>

Dalam pemilihan legislatif tidak lepas dari peran partai politik yang merupakan kendaran bagi para calon anggota legislatif serta juga partai politik memiliki peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan

---

<sup>2</sup> bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan baik atau tidaknya berjalan demokrasi di suatu daerah. Dalam mengukur sejauh mana perkembangan demokrasi, ada beberapa ciri-ciri yang mencerminkan sebuah negara atau daerah itu menjalankan sebuah demokrasi, di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern kewarganegaraan demokratis dapat ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke 19 dan 20.

<sup>3</sup> *Teori Demokrasi dalam Wawancara ketatanegaraan Perspektif pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal 3.16 hlm 413-422

merupakan pilar utama dalam kelembagaan sistem politik. Partai politik juga menjadi salah satu akses agar kepentingan dari masyarakat menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.<sup>4</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa, keberhasilan aktor politik tak lepas dari peranan partai politik. Aktor politik juga merupakan representasi dari partai politik.

Dalam sejarah partai politik di Indonesia memiliki dinamika yang berbeda pada setiap Pemilihan Legislatif. Indonesia menganut sistem multipartai, dimana sistem kepartaiannya memiliki banyak partai dan tidak hanya satu partai yang dominan, sehingga membuat banyak partai bermunculan dari berbagai ideologi yang ikut serta dalam proses politik di Indonesia. Dalam pemilu tahun 2019 terjadi hal yang menarik dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak dengan dalih memiliki sejumlah keuntungan. Penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah

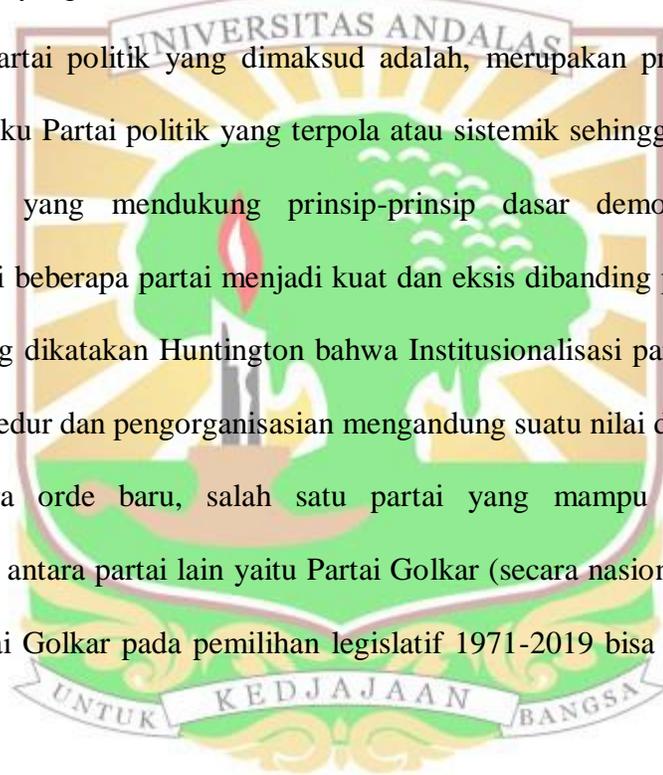
---

<sup>4</sup> Thomas meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*: Sembilan Tesis Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia Jalan Kemang Selatan II No. 2A (08) hal 30-31

memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.<sup>5</sup>

Partai politik pada hakikatnya adalah sebuah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk memaksimalkan fungsinya sebagai bangunan yang mendukung pemerintahan yang demokratis, sebuah Partai haruslah terlembagakan.<sup>6</sup> Pelembagaan Partai politik yang dimaksud adalah, merupakan proses pematapan sikap dan perilaku Partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Mengenai pelembagaan ini beberapa partai menjadi kuat dan eksis dibanding partai lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan Huntington bahwa Institusionalisasi partai adalah proses bagaimana prosedur dan pengorganisasian mengandung suatu nilai dan stabilitas.

Pada era orde baru, salah satu partai yang mampu mempertahankan eksistensinya di antara partai lain yaitu Partai Golkar (secara nasional). Jumlah suara dan posisi Partai Golkar pada pemilihan legislatif 1971-2019 bisa dilihat pada tabel 1.1:



---

<sup>5</sup> Ratnia Solihah, Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol 3 No 1 Bandung.2018

<sup>6</sup> Imansyah, Teguh, “Regulasi Partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan Partai politik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1 No.3, Desember 2012 : hlm. 5

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Suara Partai Golkar Secara Nasional pada Pemilihan Legislatif 1971-2019**

TAHUN	POSISI
1971	Pertama
1977	Pertama
1982	Pertama
1987	Pertama
1992	Pertama
1997	Pertama
1999	Kedua
2004	Pertama
2009	Kedua
2014	Kedua
2019	Ketiga

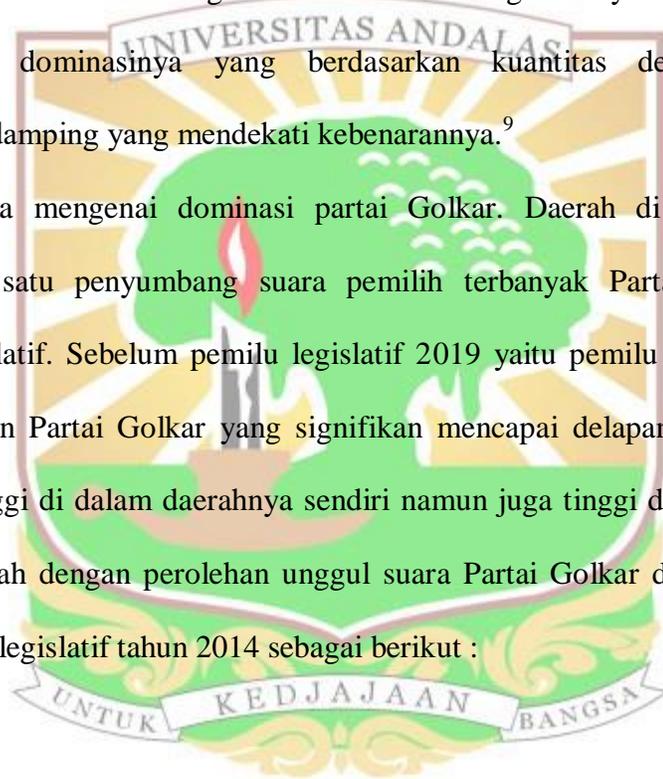
*Sumber : Diolah dari [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)*

Jika diamati dari tabel 1.1, kita bisa melihat bahwa elektabilitas dari partai Golkar (secara nasional) dari tahun 1971-2019 mampu bertahan pada setiap Pemilu Legislatif bahkan dengan banyaknya hadir partai-partai baru sekalipun tidak membuat partai Golkar berpindah dari posisi tiga besar pemegang suara terbanyak. Partai ini mampu konsisten untuk memegang kepercayaan dari rakyat pada setiap Pemilu Legislatif dan salah satu partai penyumbang kader terbesar dalam kursi legislatif dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pada masa orde baru, Presiden Soeharto yang merupakan pemegang tampuk kekuasaan pada saat itu merupakan tokoh penting yang berperan besar pada setiap kemenangan Golkar di setiap Pemilu Legislatif, hal ini bisa diamati dari kebijakannya yang mendukung kemenangan Golkar, salah satunya adalah peraturan monoloyalitas PNS. Monoloyalitas adalah kebijakan Mendagri Amir Machmud seorang jenderal

loyalis Suharto.<sup>7</sup> Dimana semua pegawai negeri sipil (PNS) menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Namun setelah runtuhnya orde baru peraturan ini dicabut dan memberikan ruang untuk partai lain untuk menyaingi dominasi partai Golkar. Dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lebih lemah baik itu dibidang politik, militer, olahraga, dan sebagainya.<sup>8</sup> Istilah dominasi politik populer ketika dikembangkan oleh Partai Golongan Karya di Indonesia untuk melambangkan dominasinya yang berdasarkan kuantitas dengan semboyan “mayoritas pendamping yang mendekati kebenarannya.”<sup>9</sup>

Berbicara mengenai dominasi partai Golkar. Daerah di Sumatera Barat menjadi salah satu penyumbang suara pemilih terbanyak Partai Golkar dalam pemilihan legislatif. Sebelum pemilu legislatif 2019 yaitu pemilu pada tahun 2014 terjadi perolehan Partai Golkar yang signifikan mencapai delapan kursi suara dan tidak hanya tinggi di dalam daerahnya sendiri namun juga tinggi di Sumatera Barat. Ada enam daerah dengan perolehan unggul suara Partai Golkar di Sumatera Barat pada pemilihan legislatif tahun 2014 sebagai berikut :



---

<sup>7</sup> <https://www.kompasiana.com/234/55001502a333119f6f50fc66/monoloyalitas-gaya-baru>

<sup>8</sup> Kbbi.web.id, “dominasi”, diakses di <http://www.kbbi.web.id/dominasi>.

<sup>9</sup> Bungaran Anton Simanjuntak, “Strategi Dominasi Dan Keutuhan Negara Bangsa Yang Pluralistik”, *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. Volume I No.2, Oktober 2005, hal. 58

**Tabel 1.2**  
**Perolehan suara unggul Partai Golkar di enam Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Pemilihan legislatif tahun 2014**

Nama Kab/Kota	Perolehan suara
Kabupaten Padang Pariaman	40.393
Kabupaten Solok	35.896
Kota Solok	5.693
<b>Kabupaten Tanah Datar</b>	<b>77.504</b>
Kabupaten Solok Selatan	16.801
Kabupaten Sijunjung	22.125

*Sumber : Diolah dari data KPU*

Dari tabel 1.2 Partai Golkar berhasil unggul di enam Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yakni Kabupaten Padang Pariaman (40.393 suara), Kabupaten Solok (35.896), Kota Solok (5.693), Kabupaten Tanah Datar (77.504), Kabupaten Solok Selatan (16.801), dan Kabupaten Sijunjung dengan (22.125) suara.

Berdasarkan tabel 1.2 peneliti melihat tingginya perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar dengan perolehan suara yang mencapai 77.504 suara. Tidak hanya mendapat perolehan suara terbanyak ternyata di Kabupaten Tanah Datar partai Golkar menjadi partai yang mendominasi Pemilihan legislatif dari tahun 2004-2014 di Kabupaten Tanah Datar. Dapat peneliti lihat bahwa partai Golkar memang tidak diragukan lagi untuk kemenangan berturut-turut setiap periode, banyak partai kuat lain yang mewarnai pemilu di Kabupaten Tanah Datar seperti partai PKS partai PAN dan partai baru Gerindra yang baru-baru ini mencuat namanya dalam kontestasi pemilu legislatif. Dapat dibuktikan dengan adanya catatan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanah Datar bahwa yang selalu mengisi kursi terdepan yaitu partai Golkar. Hal ini bisa kita lihat pada hasil pemilihan legislatif 2004-2014, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Suara Legislatif di Tanah Datar pada pemilu 2004-2019**

No	Jenis Pemilihan	Perolehan Kursi		
1	Pemilihan legislatif 2004	Golkar	10	Kursi
		PAN	8	Kursi
		PKS	5	Kursi
		PBB	4	Kursi
		PPP	4	Kursi
		PBR	3	Kursi
		PDI P	1	Kursi
2	Pemilihan legislatif 2009	Golkar	9	Kursi
		Demokrat	6	Kursi
		PAN	4	Kursi
		PKS	4	Kursi
		PPP	4	Kursi
		Hanura	3	Kursi
		PBB	2	Kursi
		PBR	3	Kursi
		PDI P	1	Kursi
		3	Pemilihan legislatif 2014	Nasdem
PKS	4			Kursi
PDIP	3			Kursi
Golkar	8			Kursi
Gerindra	3			Kursi
Demokrat	3			Kursi
PAN	4			Kursi
PPP	4			Kursi
Hanura	3			Kursi
PBB	1			Kursi
4	Pemilihan legislatif 2019			Gerindra
		PKS	5	Kursi
		Golkar	4	Kursi
		PPP	4	Kursi
		Demokrat	4	Kursi
		PAN	4	Kursi
		Nasdem	3	Kursi
		Hanura	3	Kursi
		PDI P	2	Kursi

Sumber : Diolah dari data KPUD Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 1.3 kita bisa melihat bagaimana dominasi partai Golkar mendapatkan suara terbanyak dan kemenangan mutlak pada pemilu 2004-2014. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa partai Golkar mendominasi karena Golkar memiliki pelebagaan partai yang bagus, kader yang mumpuni dan jaringan/konstituen yang mendukung partai Golkar sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Peneliti menjadi tertarik untuk menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada Pemilu Legislatif tahun 2014 tingginya perolehan suara yang diraih di Kabupaten Tanah Datar dibandingkan lima Kabupaten/kota lainnya dan di Kabupaten Tanah Datar Partai Golkar menjadi Partai yang mendominasi Pemilihan Legislatif dari tahun 2004-2014. Tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan dimana Partai Golkar tidak lagi menjadi partai yang unggul di Kabupaten Tanah Datar dan malah dilengserkan oleh Partai Gerindra yang merupakan partai baru yang track recordnya jauh dibawah Golkar dalam hal Pemilu di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti mengasumsikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam pelebagaan Partai Golkar. Pertama, adanya perpecahan di dalam Partai Golkar yang mana ada beberapa kader Partai Golkar yang keluar dan berpindah haluan ke partai lain, dalam hal ini peneliti melihat bahwasanya ada konflik internal Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar yang membuat goyah sehingga mengalami penurunan. Ini sesuai dengan poin keempat yang dikatakan Samuel P Huntington tentang kesatuan dan perpecahan. Dimana semakin terpecah

suatu organisasi semakin rendah pula tingkat pelembagaannya. Hal ini dapat peneliti buktikan dengan data berita Prokabar.com<sup>10</sup>. selanjutnya peneliti membaca penelitian terdahulu bahwa dulu Partai Golkar menjaga hubungan jaringan dengan tokoh masyarakat, sedangkan yang terjadi setelah pemilu legislatif tahun 2014 Partai Golkar tidak mampu lagi beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini sesuai dengan poin pertama yang dikatakan Samuel P Huntington tentang penyesuaian diri dan kekakuan bahwa semakin sulit sebuah organisasi beradaptasi dan bersifat kaku, maka tingkat kelembagaannya pun semakin rendah.

Penurunan suara partai Golkar tergambar jelas pada data KPU bahwasanya terjadi pada turunnya suara tiga dapil dari empat dapil di Kabupaten Tanah Datar, ini menjadi analisis peneliti nanti bahwa penurunan per dapil sangat sangat mempengaruhi suara partai Golkar pada pileg 2019. Dan juga menarik disini belum ada kajian mengenai pembahasan suara partai yang begitu signifikan seperti yang terjadi pada partai Golkar.

Berangkat dari keadaan tersebut, ketika Partai Golkar bisa mendominasi Tanah Datar dari tahun 2004-2014 seharusnya Partai Golkar memiliki banyak potensi dan peluang untuk memenangkan pemilihan legislatif kembali di Tanah Datar, ditambah dengan asumsi dan perhitungan akademis untuk membaca peluang kemenangan Golkar. Namun, tanpa diduga yang terjadi adalah penurunan suara Partai Golkar. Sesuai dengan beberapa Asumsi yang telah peneliti jabarkan, maka menjadi

---

<sup>10</sup> Data diakses dari <https://prokabar.com/perolehan-kursi-partai-koalisi-01-anjlok-di-dprd-tanah-datar-ini-kata-pengamat-politik/>

kajian menarik tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis penurunan suara partai Golkar pada Pemilihan legislatif 2019 di Tanah Datar. Mengingat selama ini kajian mainstream tentang Dominasi partai dan strategi kemenangan partai. Maka, kali ini penulis mengkaji tentang analisis penurunan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Tanah Datar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah fenomena yang menarik, karena keunggulan Golkar di Tanah Datar mampu dipatahkan oleh partai lain. Pemilihan Legislatif tersebut diikuti oleh 9 Partai Politik yaitu Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Ke Sembilan partai politik memperebutkan sejumlah 35 kursi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dengan telah ditetapkannya hasil pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Tanah Datar dalam sidang pleno terbuka komisi pemilihan umum Tanah Datar pada hari Senin (22/7/2019).<sup>11</sup> Maka perolehan kursi pada masing-masing Partai sebagai berikut:



---

<sup>11</sup> Data diakses dari <https://prokabar.com/kpu-tanah-datar-tetapkan-anggota-dprd-terpilih/>

**Tabel 1.4**  
**Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024**

No	Partai	Perolehan Kursi
1.	Gerindra	6
2.	PKS	5
3.	Golkar	4
4.	PPP	4
5.	Demokrat	4
6.	PAN	4
7.	Nasdem	3
8.	Hanura	3
9.	PDI P	2

*Sumber : Diolah dari KPUD Kabupaten Tanah Datar*

Dari tabel 1.4 bisa kita lihat bahwasanya Partai Gerindra memperoleh 6 kursi, PKS memperoleh 5 kursi, Partai Golkar memperoleh 4 kursi, Partai Demokrat memperoleh 4 kursi, PAN memperoleh 4 kursi, PPP memperoleh 4 kursi, Partai Nasdem memperoleh 3 kursi, Partai Hanura memperoleh 2 kursi dan PDI Perjuangan memperoleh 2 kursi. Pada Pemilu 2019 terjadi hal yang menarik, dimana keunggulan partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2004-2014 diakhiri oleh Partai Gerindra dan Partai PKS. yang mana Partai Gerindra mampu mengamankan 6 kursi dan Partai PKS mengamankan 5 kursi sedangkan Partai Golkar hanya mengamankan 4 kursi bersamaan dengan PAN, Partai Demokrat dan PPP.

Pemilihan legislatif tahun 2019 menjadi pemilihan yang kurang beruntung bagi Partai Golkar. yang mana pada tahun 2004-2014 lalu menjadi tahun-tahun menggembirakan bagi Partai Golkar dikarenakan dominasi yang telah diraih Partai Golkar pada Pemilihan legislatif di Kabupaten Tanah Datar yang bisa dilihat pada tabel 1.3. Keinginan Partai Golkar untuk memantapkan keunggulannya di Kabupaten Tanah Datar ter gagalkan oleh Partai Gerindra dan PKS serta dibayangi oleh PAN, PPP dan Demokrat yang memperoleh perolehan kursi yang sama dengan Partai Golkar. Apa yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar menjadi menarik bagi peneliti dimana Kontestasi Politik yang terjadi antara Partai yang selama ini telah mengungguli di Kabupaten Tanah Datar dikalahkan oleh 2 Partai yaitu Gerindra dan PKS serta diperparah dengan dibayangi oleh 3 partai yaitu PAN, PPP dan Partai Demokrat. Bisa dilihat pada Tabel 1.4.

Salah satu dari deretan partai baru yang hadir dan mampu menyaingi partai Golkar adalah partai Gerindra. Setelah memutuskan keluar dari partai Golkar, Prabowo Subianto mendirikan partai ini pada tanggal 6 Februari 2008. Partai baru ini mampu menempatkan 26 kadernya di DPR-RI pada pemilu legislatif 2009 dan 73 orang kadernya pada pemilu 2014.<sup>12</sup> Setelah PDIP, Gerindra yang hadir sebagai partai baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia mampu menyaingi keunggulan partai Golkar.

---

<sup>12</sup> Di akses dari [Tribunews.makassar.com](http://Tribunews.makassar.com)

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa partai Golkar mengalami penurunan karena ada sesuatu yang terjadi di dalam pelebagaan Partai Golkar. Pertama, adanya perpecahan di dalam Partai Golkar yang mana ada beberapa kader Partai Golkar yang keluar dan berpindah haluan ke partai lain, dalam hal ini peneliti melihat bahwasanya ada konflik internal Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar yang membuat goyah sehingga mengalami penurunan. Ini sesuai dengan poin keempat yang dikatakan Samuel P Huntington tentang kesatuan dan perpecahan. Dimana semakin terpecah suatu organisasi semakin rendah pula tingkat pelebagaannya. Hal ini dapat peneliti buktikan dengan data berita Prokabar.com<sup>13</sup>. selanjutnya peneliti membaca penelitian terdahulu bahwa dulu Partai Golkar menjaga hubungan jaringan dengan tokoh masyarakat, sedangkan yang terjadi setelah pemilu legislatif tahun 2014 Partai Golkar tidak mampu lagi beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini sesuai dengan poin pertama yang dikatakan Samuel P Huntington tentang penyesuaian diri dan kekakuan bahwa semakin sulit sebuah organisasi beradaptasi dan bersifat kaku, maka tingkat kelebagaannya pun semakin rendah.

Kelemahan pelebagaan Partai Golkar sesuai yang dikatakan dalam teori pelebagaan Partai Politik menurut Samuel P Huntington ada empat yaitu penyesuain diri dan kekakuan, ini sudah melemah dalam tubuh Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar yang mana tidak mampu lagi mempertahankan dan

---

<sup>13</sup> Data diakses dari <https://prokabar.com/perolehan-kursi-partai-koalisi-01-anjlok-di-dprd-tanah-datar-ini-kata-pengamat-politik/>

menyesuaikan kontestasi di pemilihan legislatif tahun 2019. Kemudian ada point yang keempat bahwasanya kesatuan dan perpecahan menurut Samuel P Huntington mempengaruhi pelebagaan partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Ini terbukti dengan keluarnya beberapa kader Golkar yang sangat berpengaruh dari Golkar, seperti mantan Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2005 - 2015 M. Shadiq Pasadigoe yang sudah berpindah haluan partai dari partai Golkar ke PAN begitupun dengan Bupati terpilih tahun 2015 Irdinansyah Tarmizi yang juga berpindah haluan dari partai Golkar ke Nasdem. Dari asumsi peneliti tersebutlah pentingnya penelitian ini untuk diteliti mengingat bahwasanya partai Golkar menjadi partai besar yang dapat tumbang di Kabupaten Tanah Datar yang tentu disebabkan berbagai alasan. Ini akan peneliti kupas nantinya.

Perubahan drastis ditunjukkan oleh penurunan suara partai Golkar dengan kemenangan partai Gerindra pada Pemilihan legislatif 2019. Ini semua menandakan dominasi Golkar di Kabupaten Tanah Datar semakin terkikis. Bahkan ini menjadi era baru dalam perpolitikan di Kabupaten Tanah Datar. Jadi dari penjabaran peneliti munculah pertanyaan penelitian ini, yaitu apa penyebab penurunan suara partai Golkar dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

Untuk menggambarkan dan menganalisis penyebab penurunan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2019, melalui teori pelebagaan partai Samuel P Huntington.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Secara akademis, dapat memperdalam dan mengembangkan teori pelebagaan partai untuk penelitian selanjutnya karena penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu dalam bidang politik serta pembelajaran untuk penelitian mahasiswa lainnya.
2. Secara praktis, digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi serta menjadi bahan masukan sebagai pertimbangan langkah Partai kedepannya.

